

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pariwisata dan Kepariwisataan

Pariwisata merupakan konsep yang sangat multidimensional. Tidak bisa dihindari bahwa terdapat perbedaan dalam mengartikan pariwisata yang dipakai oleh para praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai tujuan yang ingin dicapai. Definisi memang tidak dapat sama persis diantara para ahli. Di bawah ini merupakan beberapa pernyataan para ahli mengenai pariwisata :

- a. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah (UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan).
- b. Menurut Prof. Salah Wahab (1992:116.), pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri/diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, di mana ia memperoleh pekerjaan tetap.
- c. Menurut Marpaung (2000:65) pariwisata merupakan perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktifitas dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas di buat untuk memenuhi kebututhannya.

Sedangkan kepariwisataan dapat dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, misalnya saja sebagai suatu gejala yang melukiskan kepergian orang-orang didalam negaranya sendiri (pariwisata domestik) atau penyeberangan orang-orang pada tapal batas suatu negara/pariwisata internasional. Proses bepergian ini dapat menyebabkan terjadinya interaksi, persepsi, motivasi, tekanan-tekanan, kepuasan, kenikmatan, dan lain-lain diantaranya sesama pribadi atau antar kelompok, (Wahab, 1989: 3).

Menurut Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali menyatakan bahwa tujuan dari kepariwisatan tersebut adalah :

- a. melestarikan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Agama Hindu;

- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. menciptakan kesempatan berusaha;
- e. menciptakan lapangan kerja;
- f. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memperkuat rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa; dan
- i. mempererat persahabatan antarbangsa.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa tujuan dari kepariwisataan tersebut adalah :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa;

Menurut Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

Menurut Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2012, Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

Menurut Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009, Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya

tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup. KDTWK ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki daya tarik wisata alamiah berwujud keindahan alam, flora dan fauna;
- b. memiliki daya tarik wisata buatan, meliputi museum peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan; dan
- c. memiliki kekhususan berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya dan kelestarian lingkungan.

Sedangkan Daya Tarik Wisata (DTW), adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota. DTW ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki daya tarik wisata alamiah, berwujud keindahan alam, flora dan fauna;
- b. memiliki daya tarik wisata buatan, meliputi museum peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, taman rekreasi, dan tempat hiburan; dan
- c. memiliki daya tarik wisata minat khusus seperti wisata spiritual, wisata pengetahuan, wisata kuliner, wisata petualangan alam.

## **2.2 Pembangunan Pariwisata**

### **2.2.1 Usaha Pariwisata**

Menurut Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2012, Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Usaha Pariwisata meliputi, antara lain:

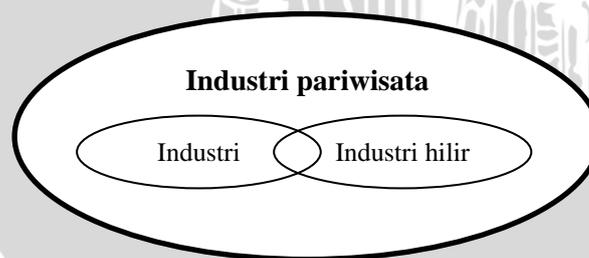
- a. Daya tarik Wisata;
- b. Jasa Transportasi wisata;
- c. Jasa perjalanan wisata;
- d. Jasa makanan dan minuman;
- e. Jasa akomodasi;

- f. Jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- g. Jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- h. Jasa informasi pariwisata;
- i. Jasa konsultan pariwisata;
- j. Jasa pramuwisata;
- k. Wisata tirta; dan
- l. Spa.

### 2.2.2. Industri Pariwisata

Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.10 Tahun 2009 bahwa industri pariwisata merupakan kumpulan usaha yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lain. Karena pariwisata bisa dikatakan sebagai gabungan fenomena dan hubungan timbal balik akibat adanya interaksi dengan wisatawan, *supplier* bisnis, pemerintah tujuan wisata serta masyarakat daerah tujuan wisata.

Menurut Warpani (2007:63) industri pariwisata adalah keterkaitan antara industri hulu dengan industri hilir yang sangat panjang dan beranekaragam, membuka lapangan kerja yang amat luas, menempati ruang wilayah dalam proporsi luas yang amat bermakna, serta menghidupkan berbagai sektor ekonomi yang sangat berarti bagi pengembangan dan perkembangan ekonomi daerah/kota. Keterkaitan antara industri hulu dan industri hilir pariwisata dapat dilihat pada **Gambar 2.1**



**Gambar 2.1 Kaitan Antar Industri**

#### A. Industri hulu

Industri hulu adalah segala industri yang produknya dibutuhkan sebagai masukan bagi proses produksi industri pariwisata, misalnya: perangkutan, biro perjalanan, dan daya tarik wisata di suatu daerah. Keberadaan daya tarik wisata (DTW) di suatu daerah merupakan potensi ekonomi yang merupakan produk hulu industri pariwisata (Warpani, 2007). Pertumbuhan industri hulu dan hilir dapat terjadi dengan adanya jaringan industri

pariwisata yang baik. Jaringan industri akan semakin luas sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi. Luasnya jaringan industri pariwisata ke hulu maupun ke hilir dengan sangat sederhana ditunjukkan oleh Lundberg dalam Warpani, 2007 pada **Gambar 2.2**



Sumber : Lundberg, Donal E. 1976; 2 dalam Warpani, 2007

**Gambar 2.2 Jaringan Industri Pariwisata**

## B. Industri hilir

Industri hilir adalah segala industri yang produknya dibutuhkan karena adanya kegiatan pariwisata, seperti: makanan, kerajinan, dan lain-lain, di mana industri hilir terdiri dari :

### 1. Industri jasa

Sebagian besar wisatawan mengurus segala keperluan perjalanannya mulai dari sebelum melakukan perjalanan wisata maupun kembali ke daerah/negara masing-masing. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan para wisatawan membutuhkan dan menggunakan jasa kepariwisataan, karena jasa kepariwisataan juga berperan dalam terselenggaranya kegiatan berwisata. Industri jasa dapat dibagi menjadi :

#### a. Biro pariwisata.

Biro pariwisata atau organisasi jasa pelayanan pariwisata yang ada di Indonesia, yaitu :

- Biro Perjalanan Umum (BPU).

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan paket wisata dan Agen Perjalanan.

- Agen Perjalanan (AP).

Adalah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan tiket/karcis sarana angkutan dan lain-lain serta pemesanan sarana wisata.

- Cabang Biro Perjalanan Umum (CBPU).

Merupakan satuan-satuan usaha dari suatu BPU yang berkedudukan di tempat yang sama atau di tempat lain dan yang memberikan pelayanan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan BPU.

b. Pemandu wisata (*tour guide*).

Merupakan usaha jasa yang erat kaitannya dengan agen/biro perjalanan. Jasa pemandu wisata bisa berupa jasa perorangan (termasuk sektor informal) atau bagian dari pelayanan agen/biro perjalanan yang bersangkutan. Pemandu wisata ada dua jenis, yaitu :

- Para pemandu wisata adalah orang bebas yang tidak terikat pada satu perusahaan.
- Para pemandu wisata memiliki ikatan dengan satu atau lebih agen/biro.

c. Jasa boga (makanan).

Rumah makan (yang unik dan eksklusif) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia kepariwisataan secara keseluruhan. Peluang pasar ini menghasilkan usaha jasa boga yang tersebar di berbagai penjuru kota, serta tidak jarang memilih lokasi yang eksklusif dengan sajian khas dan beberapa atraksi yang menarik.

d. Pertukaran valuta.

Keberadaan usaha penukaran uang (*money changer*) sangat mempermudah kepentingan para wisatawan. Dengan sistem perbankan dan pertukaran valuta hampir di setiap tempat (terutama di hotel berbintang dan pusat perbelanjaan) para wisatawan bisa dengan mudah mendapatkan mata uang setempat sebagai alat pembayaran. Selain itu, jasa pertukaran valuta juga telah membuka lapangan kerja yang cukup berarti.

2. Industri rumah tangga

Industri rumahan adalah industri yang dikerjakan oleh sebuah rumah tangga sebagai usaha sampingan. Satu jenis produk bisa dihasilkan oleh beberapa rumah tangga tanpa adanya hubungan atau ikatan usaha; masing-masing berdiri dan dikelola sendiri-sendiri. Selain itu, industri rumah tangga juga mampu

menghasilkan berbagai macam produk. Melalui industri rumah tangga, maka keterlibatan masyarakat dalam dunia pariwisata bisa diwujudkan. Industri rumah tangga dibagi menjadi :

a. Kriya/kerajinan.

Industri kerajinan merupakan industri cenderamata yang menjadi produk khas di suatu daerah/negara, yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh maupun sebagai pengingat bagi para wisatawan, bahwa mereka pernah melakukan kunjungan wisata ke daerah/negara tersebut. Cenderamata tersebut bisa berupa: benda seni, pakaian, miniatur, dan lain sebagainya.

b. Makanan khas.

Sebagian besar makanan khas adalah hasil dari industri rumahan. Meskipun sudah ada pabrik, industri rumahan masih tetap berperan dan merupakan industri yang dapat menghidupi banyak orang, karena mata rantainya yang cukup panjang. Makanan khas misalnya: Dodol Garut (Garut), Gudeg (Yogyakarta), Getuk (Magelang), dan lain sebagainya.

Pembangunan pariwisata, selain mempunyai sasaran meningkatkan devisa negara dari sektor kepariwisataan, juga mengembangkan industri kepariwisataan yang sangat kompleks, membuka peluang kerja serta keikutsertaan masyarakat di sektor kepariwisataan dalam bentuk peran serta swasta secara formal, maupun perkembangan sektor informal sebagai pusat ekonomi kerakyatan.

### **2.2.3 Komponen Pengembangan Pariwisata**

Dalam melakukan perjalanan wisata, seorang wisatawan memerlukan bermacam jasa dan produk wisata yang dibutuhkannya. Berbagai macam jasa dan produk wisata inilah yang disebut dengan Komponen Pariwisata. Komponen pariwisata ini dapat disediakan oleh pihak pengusaha, masyarakat atau siapapun yang berminat untuk menyediakan jasa pariwisata. Proses perubahannya terus berlangsung seiring dengan pembangunan sarana prasarana, dan fasilitas lainnya atau dengan kata lain, perencanaan pariwisata dimulai dengan pengembangan pariwisata daerah yang meliputi pembangunan fisik obyek wisata yang dijual berupa fasilitas akomodasi, restoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, angkutan wisata, dan perencanaan promosi yang disebut dengan komponen pariwisata.

### A. Daya tarik wisata

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009, Daya Tarik Wisata dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Menurut Yoeti (1988; 158-164), hal-hal yang membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung ke suatu daerah ada tiga, yaitu :

1. Benda-benda yang tersedia di alam semesta, yang di dalam kepariwisataan dikenal dengan sebutan kenikmatan alam (*natural amenities*), misalnya: iklim, pemandangan, flora dan fauna, pusat kesehatan, sumber air mineral;
2. Hasil ciptaan manusia, seperti: monumen bersejarah dan sisa peradaban masa lampau, museum, gerai seni, perpustakaan, kesenian rakyat, acara tradisional, pameran, festival, rumah ibadah;
3. Tata cara hidup masyarakat, antara lain: kebiasaan hidup, adat istiadat.

Berhasil atau tidaknya suatu tempat berkembang menjadi Daya Tarik Wisata sangat bergantung kepada 3 faktor utama (Samsuridjal dan Kaelany, 1997:21), yaitu :

1. Atraksi, dapat dibedakan menjadi :
  - a. Tempat; misalnya tempat dengan iklim yang baik, pemandangan yang indah, atau tempat-tempat bersejarah.
  - b. Kejadian/peristiwa; misalnya tempat kongres, pameran atau peristiwa-peristiwa olahraga, festival dan sebagainya.

2. Mudah dicapai (Aksesibilitas)

Tempat yang dituju dekat jaraknya serta terdapat transportasi ke tempat tersebut secara teratur, mudah, nyaman, dan aman.

3. Amenitas

Tersedianya fasilitas-fasilitas, seperti tempat penginapan, restoran, hiburan, transportasi lokal yang memungkinkan wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut serta alat-alat komunikasi lainnya.

Selain ketiga faktor tersebut masih ada faktor lainnya, yaitu *Tourism Organization* (organisasi kepariwisataan) yang berfungsi untuk menyusun suatu kerangka dalam pengembangan pariwisata, mengatur industri pariwisata serta mempromosikan daerah tersebut.

### B. Sarana wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya (Suwanto,

2004:22). Menurut Lothar A.Kreck dalam (Yoeti, 1996:197) sarana kepariwisataan terbagi atas :

1. Sarana pokok kepariwisataan.

Merupakan perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata, termasuk ke dalam kelompok ini adalah: *travel agent* dan *tour operator*, perusahaan-perusahaan angkutan wisata, hotel dan jenis akomodasi lainnya, bar dan restoran, serta rumah makan lainnya, objek wisata, dan atraksi wisata lainnya.

2. Sarana pelengkap kepariwisataan.

Adalah perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah sarana olah raga seperti lapangan tenis, lapangan *golf*, kolam renang, permainan *bowling*, daerah perburuan, berlayar, berselancar, serta sarana ketangkasan seperti permainan bola sodok, *Jackpot*, *Pachino*, dan *amusement* lainnya.

3. Sarana penunjang kepariwisataan.

Yaitu perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok dan berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata, tetapi fungsi yang lebih penting adalah agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uangnya di tempat yang di kunjungi. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah *night club*, *steambath*, dan *casino*.

Menurut Warpani (2007:99) sarana dan fasilitas pariwisata, yaitu :

1. Moda angkutan.

Moda angkutan dapat berupa angkutan pribadi maupun jasa angkutan umum, termasuk angkutan umum massal. Angkutan yang dipilih tergantung darimana asal wisatawan tersebut.

2. Penginapan/Akomodasi.

Industri perhotelan merupakan industri besar yang mempunyai jaringan internasional, pemasarannya dikendalikan secara profesional dan pelik, menjalin kerjasama dengan industri penerbangan dan biro perjalanan, sehingga menjadi mata rantai yang sangat penting bagi dunia kepariwisataan. Daerah tujuan wisata yang mempunyai potensi daya tarik wisata sangat perlu mengembangkan fasilitas akomodasi yang memadai agar menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah

tujuan wisata tersebut, sehingga akan berpengaruh terhadap pengembangan daerah tujuan wisata tersebut.

3. Rumah makan.

Rumah makan merupakan salah satu usaha yang melibatkan masyarakat setempat selain usaha pedagang eceran, usaha kerajinan, jasa kepariwisataan, perangkutan dan masih banyak lagi lainnya. Tidak jarang tamu hotel (wisatawan) memilih untuk makan di luar hotel terutama di warung-warung makan yang mencirikan khasa daerah tersebut dengan makanan khas daerah tersebut.

4. Lembaga keuangan.

Keberadaan lembaga keuangan dalam hal ini perbankan dan *money changer* mempermudah serta membuat wisatawan semakin nyaman untuk bepergian, karena wisatawan tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup besar.

5. Pusat perbelanjaan.

Berbelanja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pariwisata. Bahkan bagi suatu daerah tujuan wisata, berbelanja merupakan salah satu jenis pariwisata yang memiliki makna yang cukup besar. Karena wisatawan tidak mungkin tidak berbelanja pada daerah tujuan wisata.

6. Kesehatan.

Mendapatkan jaminan bahwa di daerah tujuan wisata yang akan mereka kunjungi mempunyai akses mudah ke fasilitas kesehatan, baik untuk pertolongan pertama maupun untuk perawatan lanjut di rumah sakit yang lengkap merupakan hal terpenting bagi para wisatawan. Jaminan kesehatan ini sangat penting terutama pada jenis wisata yang mengandung resiko.

7. Sarana pelengkap.

Selain mutu jasa layanan perangkutan, kegiatan kepariwisataan dipengaruhi juga oleh mutu jasa layanan komunikasi dan informasi. Informasi yang lengkap dan cermat mengenai daerah tujuan wisata, dan daya tarik wisata merupakan hal yang sangat penting bagi calon wisatawan. Jenis sarana pelengkap pariwisata yaitu : pos, telepon, telegram, radio, televisi, media cetak, internet dan e-mail. Fasilitas tersebut sangat penting artinya bagi pengembangan pariwisata, karena menjadi media informasi dan promosi bagi daerah tujuan wisata untuk menarik kunjungan wisatawan.

### C. Prasarana wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya (Suwantoro, 2004:21).

Menurut Warpani (2007:99) kelengkapan prasarana dan sarana adalah faktor penunjang perkembangan pariwisata yang secara langsung akan berpengaruh terhadap pola pencarian arus wisatawan menuju DTW dan selanjutnya menuju objek wisata.

Prasarana/utilitas terdiri dari :

#### 1. Jaringan perangkutan.

Berbagai kegiatan di bidang sosial, ekonomi, budaya, termasuk kegiatan pariwisata memerlukan dukungan sektor perangkutan sebagai urat nadi seluruh kegiatan tersebut. Angkutan membawa wisatawan dari negara atau tempat asalnya ke DTW dan selanjutnya menuju objek wisata. Pilihan transportasi yang digunakan adalah moda angkutan darat, laut, dan udara. Pelayanan angkutan pariwisata tidak selalu harus khusus untuk kepentingan pariwisata semata, melainkan bisa menyatu dan terpadu dengan pelayanan angkutan umum, terutama pelayanan angkutan antarkota dan angkutan perkotaan. Fasilitas angkutan meliputi :

##### a. Jalan (aksesibilitas).

Aksesibilitas merupakan daya hubung antarzona yang wujudnya berupa fasilitas angkutan dalam arti luas, meliputi jaringan angkutan, yakni: kapasitas terminal (bandara, pelabuhan, stasiun), jaringan jalan; dan jaringan pelayanan meliputi: ketersediaan wahana/armada (moda angkutan), biaya wajar, layanan andal, dan jaringan trayek.

##### b. Terminal (darat, laut, dan udara).

Terminal (bandara, dermaga/pelabuhan, stasiun, dan terminal bus) atau simpul jasa angkutan merupakan titik kontak pertama wisatawan dengan negara/daerah tujuan. Terminal memiliki fungsi pokok (Warpani, 1985:36), yaitu :

- menyediakan akses ke kendaraan yang bergerak pada jalur khusus;
- menyediakan tempat dan kemudahan perpindahan atau pergantian moda angkutan dari kendaraan yang bergerak pada jalur khusus ke kendaraan lain;
- menyediakan sarana simpul lalu lintas, tempat konsolidasi lalu lintas;

- menyediakan tempat untuk menyimpan kendaraan, serta fungsi penunjang, yaitu:
- menyediakan pusat perbelanjaan, khususnya pada bandara internasional, tempat pertama dan terakhir seseorang berbelanja, bahkan mungkin juga tempat pertama seseorang menukar mata uang setempat di suatu negara dalam satu peristiwa kunjungan.

c. Jaringan pelayanan.

Jaringan pelayanan angkutan darat terdiri dari trayek dan lintasan, sedangkan pada angkutan laut adalah jalur pelayaran dan pada angkutan udara terdiri dari lintas utama, lintas pengumpan, dan lintas perintis, baik yang terjadwal maupun tidak terjadwal.

Pada dewasa ini jasa angkutan udara mendominasi perjalanan antarnegara dan antar benua. Hampir semua angkutan penumpang yang melintasi lautan dilakukan oleh angkutan udara (Wahab, 1992:318).

d. Keterpaduan sistem perangkutan.

Keterpaduan sistem perangkutan meliputi keterpaduan atarmoda dan pelayanan angkutan antardaerah. Kegiatan pariwisata hampir selalu dilakukan menggunakan berbagai moda secara beruntun dan para wisatawan melakukan kegiatan ganda serta objeknya hampir selalu mencakup lebih dari satu wilayah administrasi pemerintah.

e. Peranan perangkutan dalam kepariwisataan.

Perangkutan menempati kedudukan yang vital sebagai prasyarat, faktor dominan, dan pembentuk jaringan antardaerah wisata. Pola aliran wisatawan adalah turunan atau diakibatkan oleh sistem distribusi sarana jalan dan terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara (Dephub, 1980:261).

2. Jaringan utilitas.

Jaringan utilitas terdiri dari :

a. Air bersih.

Industri adalah sektor kegiatan yang sangat banyak membutuhkan air. Air untuk industri diperoleh dari sumber air dalam.

b. Listrik.

Ketersediaan sumber energi (listrik) adalah prasyarat bagi pengembangan industri seperti perhotelan, bahkan banyak industri rumahan pun membutuhkan dan juga tergantung pada ketersediaan listrik.

Menurut Warpani (2007:16) komponen-komponen pariwisata dikelompokkan menjadi :

1. Utama, yakni: daya tarik, merupakan komponen yang menjadi pemicu pariwisata, dan penduduk baik sebagai pelaku pariwisata (tuan rumah pariwisata), maupun menjadi objek wisata (sasaran penelitian);
2. Persyaratan, merupakan komponen yang menjadi persyaratan proses berlangsungnya kegiatan pariwisata, yaitu: perangkutan;
3. Penunjang, seperti:
  - a. informasi dan promosi, yang membangun dan mendorong keinginan untuk berwisata.
  - b. Sarana pelayanan, merupakan komponen yang membuat proses kegiatan pariwisata menjadi lebih mudah, nyaman, aman, dan menyenangkan berupa hotel, motel, penginapan, rumah makan, dan lain-lain.

Menurut Pitana (2009:130) komponen-komponen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Atraksi destinasi.  
Merupakan komponen-komponen yang terkandung dalam destinasi dan lingkungan di dalamnya yang secara individual atau kombinasinya memegang peran penting dalam memotivasi wisatawan untuk berkunjung ke destinasi tersebut. Atraksi destinasi bisa berupa atraksi alam, atraksi sosial, dan atraksi budaya.
2. Fasilitas destinasi.  
Merupakan komponen dalam destinasi yang memungkinkan wisatawan untuk tinggal di destinasi tersebut, sehingga dapat menikmati atau berpartisipasi dalam atraksi yang ditawarkan.
3. Aksesibilitas.  
Merupakan mudah atau sulitnya wisatawan untuk menjangkau destinasi yang diinginkan.
4. Imej (*image*).  
Merupakan ide atau kepercayaan yang dimiliki wisatawan tentang produk atau pelayanan yang mereka beli maupun yang akan beli.

#### 5. Harga.

Merupakan jumlah keseluruhan dari biaya-biaya selama perjalanan wisata yang mencakup akomodasi, makanan dan minuman, biaya perjalanan dan partisipasi dalam pelayanan yang dikonsumsi selama berada di destinasi wisata yang dituju.

### 2.2.4 Dampak Pariwisata

Menurut Soemarwoto (2003) dampak merupakan perubahan yang terjadi di dalam suatu lingkup lingkungan akibat adanya perbuatan manusia. Untuk dapat menilai terjadinya dampak, perlu adanya sesuatu acuan yaitu kondisi lingkungan sebelum adanya aktivitas. Oleh karena itu dampak lingkungan adalah selisih antara keadaan lingkungan tanpa proyek dengan keadaan lingkungan dengan proyek. Dampak dari suatu kegiatan pembangunan berpengaruh terhadap aspek sosial dan ekonomi.

Dampak pariwisata dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu ekonomi, sosial kultural dan lingkungan. Berikut merupakan penjelasan dampak-dampak yang diakibatkan pariwisata terkait aspek ekonomi. Menurut Soekadijo (1997) dampak ekonomi pariwisata yaitu dampak negatif atau dampak positif yang timbul terhadap lingkungan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata terhadap perubahan pekerjaan dan pendapatan masyarakat, pola pembagian kerja, kesempatan kerja dan berusaha. Kesempatan kerja dan berusaha adalah adanya peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan berusaha dengan perkembangan pariwisata karena semakin banyaknya pembangunan hotel, restoran dan munculnya usaha yang menunjang dari kegiatan pariwisata tersebut.

Sementara menurut WTO (1980; 9-12) menjelaskan dampak positif pariwisata sebagai berikut :

#### 1. Meningkatnya permintaan akan produk pertanian lokal.

Bagi daerah tujuan wisata yang sudah mengintegrasikan pembangunan pariwisata dengan pembangunan pertaniannya, permintaan akan produk pertanian merupakan kesempatan bagus bagi petani lokal untuk menyuplai dan memproduksi hasil pertanian yang diinginkan.

#### 2. Memacu pengembangan lokasi atau lahan yang kurang produktif.

Keberadaan pariwisata mampu meningkatkan nilai tanah/lahan, terlebih bagi lahan pertanian yang subur.

#### 3. Menstimulasi minat dan permintaan akan produk eksotik dan tipikal bagi suatu daerah atau negara.

Keunggulan spesifik pada suatu daerah atau negara dijadikan andalan untuk menarik wisatawan. Keunggulan spesifik itu bisa berupa pemandangan yang eksotik, kerajinan yang unik, kesenian yang menawan, dan sebagainya. Apabila hal tersebut diminati oleh wisatawan akan bisa membangkitkan perekonomian daerah dan negara tersebut.

4. Meningkatkan jumlah dan permintaan akan produk perikanan dan laut.

Para wisatawan sangat banyak memanfaatkan produk perikanan dan bahan makanan dari laut, dengan tingginya permintaan akan bahan makanan dari laut mendorong permintaan bagi nelayan lokal dan peningkatan pendapatannya, sehingga ujungnya akan dapat mensejahterakan nelayan lokal.

5. Mendorong pengembangan wilayah dan penciptaan kawasan ekonomi baru.

Tidak dapat dipungkiri, pariwisata memerlukan suatu kawasan eksklusif yang agak berbeda dari lingkungan sekitarnya.

6. Menghindari konsentrasi penduduk dan penyebaran aktivitas ekonomi.

Tidak jarang sebuah *resort* atau objek pariwisata dipilih di daerah pinggiran, pegunungan, pantai, dan lokasi eksotis lainnya. Hal ini akan membantu penyebaran konsentrasi penduduk dan penyebaran aktivitas ekonomi ke wilayah lain.

7. Penyebaran infrastruktur ke pelosok wilayah.

Lokasi objek wisata yang menyebar ke daerah pinggiran memerlukan infrastruktur (jalan, rel kereta api, sarana komunikasi, air bersih, listrik, gas, dan sebagainya) untuk mendukungnya. Dengan begitu masyarakat lokal pun dapat ikut merasakan infrastruktur dengan kualitas internasional.

8. Manajemen pengelolaan sumber daya sebagai sumber *revenue* bagi otoritas lokal.

Bagi pemerintah atau otoritas lokal yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya, berkembangnya kepariwisataan di suatu daerah juga berarti ada peningkatan kebutuhan akan sumber daya (air, listrik, gas, dan lain sebagainya). Di mana, itu berarti menjadi sumber pendapatan yang memberikan keuntungan yang signifikan bagi pemerintah atau otoritas lokal tersebut, karena perbedaan harga diberlakukan antara sektor pariwisata dengan sektor lainnya.

Menurut Yoeti (1996: 23-4) keuntungan-keuntungan pada umumnya yang diharapkan dari pariwisata adalah :

1. Peningkatan pertumbuhan urbanisasi sebagai akibat adanya pembangunan prasarana dan sarana kepariwisataan dalam suatu wilayah atau suatu daerah tujuan.
2. Kegiatan beberapa industri yang berhubungan dengan pelayanan pariwisata, seperti perusahaan angkutan, akomodasi perhotelan, restoran, hiburan, toko cenderamata, kesenian daerah, kerajinan, perusahaan perabot rumah tangga, tata hias dan pertamanan, pendidikan, dan lain-lain.
3. Meningkatkan produk hasil kebudayaan akibat meningkatnya konsumsi oleh para wisatawan, seperti timbulnya istilah kebudayaan komersial demi kebutuhan wisatawan.
4. Menyebarnya pemerataan pendapatan nasional.
5. Membantu pemerataan pendapatan penduduk dunia dengan adanya perpindahan uang dari negara-negara kaya ke negara-negara yang miskin.
6. Salah satu jalan atau cara pemerintah dalam meningkatkan penghasilan devisa negara.
7. Menimbulkan efek ganda (*multiplier*) pada negara-negara tujuan wisata, yaitu :
  - a. Pengganda wisata (*Tourist multiplier*)
  - b. Pengganda investasi (*Investment multiplier*)
  - c. Pengganda niaga mancanegara (*Foreign trade multiplier*)
8. Memperluas pasaran barang-barang yang dihasilkan dalam negeri.

Menurut Warpani (2007: 79), menyatakan peranan pariwisata bagi daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Peran pariwisata atas perekonomian daerah.

Pariwisata memiliki peranan tersendiri bagi perekonomian daerah yang dibagi ke dalam :

- a. Peran sektor swasta.

Melalui sektor swasta, maka keterlibatan masyarakat secara langsung dapat disalurkan/dilakukan. Pemerintah sifatnya hanya memberi peluang dan kemudahan-kemudahan tanpa menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pemerintah harus turut serta dalam suatu sektor kegiatan, maka fungsinya sebagai katup pengaman dan bukan pesaing, perintis, serta pemicu atau pemacu kegiatan.

b. Peran sektor informal.

Hubungan pariwisata dengan sektor informal tak perlu diragukan lagi, karena banyak peluang kerja di sektor informal telah terbuka berkat perkembangan pariwisata, misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang bermobil, serta pasar minggu.

2. Menciptakan lapangan pekerjaan.

Pembangunan pariwisata akan membuka peluang atau kesempatan kerja bagi :

a. Tenaga kerja terdidik dan terlatih.

Dari sisi positif tidak dapat dipungkiri, bahwa pariwisata membuka kesempatan kerja yang cukup luas bagi masyarakat, karena industri pariwisata memiliki mata rantai kegiatan yang sangat panjang. Kesempatan kerja membuka peluang atau mengundang arus perpindahan penduduk dari daerah lain dan/atau meningkatkan mobilitas penduduk antardaerah berupa kegiatan ulang-alik.

b. Tenaga kerja setempat.

Tenaga kerja setempat yang terdidik dan terlatih tentu memiliki peluang terbesar untuk memasuki peluang-peluang kerja yang ada, namun pada umumnya tenaga kerja setempat tidak memiliki kepandaian dan pengetahuan serta keterampilan yang sesuai dengan peluang yang tersedia.

3. Pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan dan peran serta masyarakat setempat diharapkan arahnya lebih kepada peningkatan kinerja dibidangnya masing-masing tanpa harus beralih profesi. Pemberdayaan ini berupa :

a. Industri kecil.

Masyarakat yang ada di daerah tujuan wisata yang memiliki industri kecil, misalnya kerajinan anyaman, kerajinan patung, kerajinan ukiran, masyarakat nelayan dan sebagainya, harus dibina dan dilatih sehingga bisa meningkatkan mutu dari kegiatan industri kecil mereka. Sebab, membina masyarakat yang memiliki industri kecil untuk meningkatkan mutu dagangan atau kerajinan mereka jauh lebih mudah daripada melatihnya menjadi *roomboy*.

b. Persewaan.

Usah persewaan merupakan sektor yang cukup mudah dimasuki peran serta masyarakat, selain sektor informal, karena usaha persewaan tidak menuntut alih profesi atau memerlukan pendidikan atau keterampilan khusus. Usaha

persewaan tersebut misalnya, persewaan tikar untuk duduk, persewaan ban bekas sebagai pelampung, persewaan rumah-rumah penduduk atau pondok wisata (*home stay*), persewaan kendaraan, dan lain sebagainya.

#### 4. Pendapatan asli daerah.

Pariwisata yang dikelola dengan baik akan dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi daerah yang bersangkutan. Pendapatan tersebut berupa :

##### a. Pendapatan langsung.

Merupakan pendapatan dari restribusi masuk objek pariwisata, dan pajak tontonan dari atraksi wisata.

##### b. Pendapatan tak langsung.

Merupakan pendapatan yang bersumber dari elemen pendukung kegiatan pariwisata, misalnya pajak hotel dan restoran.

Dari penjelasan beberapa pakar tersebut terlihat jelas bahwa pariwisata memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Sekarang tinggal bagaimana cara daerah untuk mengembangkan potensi pariwisata yang daerah tersebut miliki. Karena pariwisata sudah jelas sangat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Menurut Rai Utama (2011) pada sebuah negara atau destinasi wisata, pariwisata secara nyata berpengaruh positif terhadap perekonomian seperti :

##### 1. Pendapatan devisa dan pemicu investasi (*foreign exchange earning*)

Pengeluaran sektor pariwisata akan menyebabkan perekonomian masyarakat lokal menggeliat dan menjadi stimulus berinvestasi dan menyebabkan sektor keuangan bertumbuh seiring bertumbuhnya sektor ekonomi lainnya.

##### 2. Pendapatan untuk pemerintah (*contributions to government revenues*)

Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan pemerintah dapat diuraikan menjadi dua, yakni: kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung berasal dari pajak pendapatan yang dipungut dari para pekerja pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata pada kawasan wisata yang diterima langsung oleh dinas pendapatan suatu destinasi.

##### 3. Penyediaan dan penciptaan lahan pekerjaan (*employment generation*)

Pada beberapa negara yang telah mengembangkan sektor pariwisata, terbukti bahwa sektor pariwisata secara internasional berkontribusi nyata terhadap penciptaan peluang kerja, penciptaan usaha-usaha terkait pariwisata seperti usaha akomodasi, restoran, klub, taxi, dan usaha kerajinan seni souvenir.

4. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur baik untuk *host* maupun *tourist* (*infrastructure development*)

Mengembangkan pariwisata harus diikuti dengan membangun yakni daya tarik wisata *attractions* khususnya daya tarik wisata *man-made*, sementara untuk daya tarik alamiah dan budaya hanya diperlukan penataan dan pengemasan. Karena Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi *acesable* akhirnya akan mendorong pemerintah untuk membangun jalan raya yang layak untuk angkutan wisata, sementara fasilitas pendukung pariwisata *amenities* seperti hotel, penginapan, restoran juga harus disiapkan. Sektor pariwisata yang berkembang pesat akan dapat mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya, sebagai konsekuensi logis dan kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat lokal itu sendiri sebagai tuan rumah.

5. Pemicu pembangunan perekonomian lokal (*development of local economies*)

Pengukuran nilai ekonomi pada suatu kawasan wisata seringkali melihat pendapatan sektor pariwisata. Namun, ada beberapa pendapatan lokal sangat sulit untuk dihitung, karena tidak semua pengeluaran wisatawan dapat diketahui dengan jelas seperti misalnya penghasilan para pekerja informal seperti sopir taksi tidak resmi, pramuwisata tidak resmi, dan lain sebagainya.

### 2.3 Wisatawan

Menurut Warpani (2007:16) wisata adalah perjalanan ke luar dari tempat tinggalnya untuk mengunjungi tempat tertentu (destinasi) secara sukarela dan bersifat sementara dengan maksud berlibur, bertamasya dan/atau kepentingan lain di tempat yang dikunjunginya, tetapi bukan untuk mencari nafkah. Wisatawan atau pelancong atau turis adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Secara umum wisatawan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Wisatawan nusantara (Winus).

Wisatawan nusantara adalah warga negara yang berwisata di dalam wilayah negaranya sendiri.

2. Wisatawan mancanegara (Wisman).

Wisatawan mancanegara adalah warga suatu negara yang berwisata ke wilayah negara lain.

Menurut UNWTO, *visitor* adalah orang yang mengunjungi negara lain untuk beragam tujuan selain untuk bekerja/kegiatan yang dibayar dari negara yang dikunjungi. Definisi ini mencakup hal-hal dibawah ini:

1. *International tourist* (wisatawan internasional).

Pelancong sementara yang tinggal paling tidak 24 jam di negara yang dikunjungi dengan tujuan perjalanan yang dapat diklasifikasikan diantaranya, yaitu leisure (rekreasi, liburan, kesehatan, studi, agama, dan olah raga) atau bisnis (keluarga, misi tertentu, pertemuan).

2. *Excursionists*.

Pelancong sementara yang tinggal kurang dari 24 jam di negara yang dikunjungi, termasuk di dalamnya penumpang kapalpesiar/penyeberangan.

Pada prinsipnya dasar-dasar klasifikasi wisatawan dapat dikelompokan atas dua, yaitu atas dasar interaksi dan atas dasar kognitif-normatif. Pada tipologi atas dasar interaksi, penekanannya adalah sifat-sifat interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, sedangkan tipologi atas dasar kognitif-normatif lebih menekankan pada motivasi yang melatar-belakangi perjalanan.

## 2.4 Kemiskinan

### 2.4.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan menurut *World Bank Institute* (2005) adalah seseorang dengan barang yang dibutuhkan lebih banyak atau lebih besar daripada pendapatan yang didapatkan, dalam hal ini fokus utamanya terdapat pada rumah tangga ataupun individu yang memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Kemiskinan tersebut dapat diukur dengan membandingkan pendapatan individu dengan konsumsi yang dibutuhkan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2014), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan (GK). Sedangkan, kemiskinan dapat pula dilihat dengan standar garis kemiskinan (*poverty line*) makanan dan non makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan minimum non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan,

angkutan, pakaian dan barang/jasa lainnya. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Definisi menurut UNDP dalam Cahyat (2004), adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan. Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :

1. Kemiskinan absolut.

Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

2. Kemiskinan relatif.

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

#### 2.4.2 Indikator Kemiskinan

Menurut *World Bank Institute* (2005), berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, terdapat 4 indikator kemiskinan yang dapat digunakan yaitu:

1. *Head Count Index*, yaitu prosentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK);
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan;
3. Indeks Keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin

tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin; dan

4. Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index*) yang merupakan indikasi standar hidup suatu negara untuk melengkapi Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Indeks kemiskinan manusia fokus pada kekurangan dalam tiga elemen penting dari kehidupan manusia yang terdapat pada HDI yaitu angka harapan hidup, pengetahuan dan standar kehidupan yang layak.

Selain dari *World Bank Institute*, indikator tersebut juga didukung oleh BPS yang menjabarkan indikator kemiskinan sebagai berikut :

1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

2. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran nilai 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata, yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna, yaitu satu orang memiliki segalanya dan orang-orang lain tidak memiliki apa-apa.

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan

gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

#### 5. Jumlah Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

#### 2.4.3 Kriteria Kemiskinan

Menurut BPS Tahun 2014, kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan kemiskinan tersebut diantaranya adalah:

1. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang;
2. Lantai tempat tinggal berupa tanah/bambu/kayu yang murah;
3. Dinding tempat tinggal berupa bambu/rumbai/kayu yang murah atau tembok yang tidak diplester;
4. Tidak mempunyai WC/toilet/kakus sendiri/bersama;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik (PLN);
6. Air minum atau air bersih yang digunakan berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang;
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
9. Hanya membeli satu pasang pakaian baru dalam satu tahun;
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
12. Kepala rumah tangga: petani dengan luas 0,5 Ha/buruh tani/nelayan/buruh bangunan/buruh perkebunan dengan penghasilan di bawah Rp 600.000,- per bulan;

Untuk melihat kemakmuran suatu wilayah dapat diukur melalui salah satu indikator, yaitu PDRB per kapita yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama setahun (PDRB Provinsi Bali 2012 : 149).

13. Kepala rumah tangga : tidak lulus SD/ lulusan SD; dan

14. Tidak mempunyai harta benda yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000,00. Jika minimal 9 variabel tersebut terpenuhi, maka suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin.

#### 2.4.4 Faktor-Faktor Kemiskinan

Menurut Rais (1995:146) kondisi kemiskinan itu tentu disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang berbeda, diantaranya adalah :

1. Kesempatan kerja.

Seseorang itu miskin karena menganggur, sehingga tidak memperoleh penghasilan atau kalau bekerja tidak penuh, baik dalam ukuran hari, minggu, bulan atau tahun.

2. Upah gaji di bawah standar minimum.

Seseorang bisa memiliki pekerjaan tertentu, misalnya di pabrik yang modern. Tetapi jika upahnya di bawah standar, sementara itu pengeluarannya cukup tinggi, maka orang tersebut juga tergolong miskin.

3. Produktivitas kerja yang rendah.

Lebih dari 60% insiden kemiskinan terdapat di sektor pertanian. Pada umumnya kemiskinan di sektor ini karena produktivitasnya yang masih rendah.

4. Ketiadaan aset.

Di bidang pertanian, kemiskinan terjadi karena petani tidak memiliki lahan atau kesempatan untuk mengolah lahan.

5. Diskriminasi.

Kemiskinan terjadi karena diskriminasi seks, karena upah perempuan per bulannya rata-rata 56% dari penghasil laki-laki.

6. Tekanan harga.

Pendapatan yang rendah bukan hanya disebabkan karena rendahnya produktivitas, melainkan juga karena tekanan harga.

7. Penjualan tanah.

Penjualan tanah, baik tanah pertanian, pertambangan atau perumahan bisa menimbulkan kejatuhan dan akhirnya kemiskinan.

Menurut Soekadijo (1997), Kehidupan ekonomi masyarakat adalah tata cara yang dilakukan oleh sebagian kelompok atau kesatuan hidup manusia yang berusaha mengatur diri mereka untuk mencukupi berbagai kebutuhan dalam hidupnya sehingga mencapai kesejahteraan atau kemakmuran. Faktor yang mempengaruhi kehidupan ekonomi

masyarakat antara lain :

1. Mata pencaharian penduduk terdiri dari petani, pedagang, pegawai, karyawan, buruh industri, dan lain-lain;
2. Tersedianya lapangan usaha atau lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Keadaan dan kondisi geografis masyarakat;
4. Sumber daya alam dan sumber daya manusianya;
5. Banyak dan sedikitnya jumlah industri-industri yang ada di masyarakat;
6. Kemajuan-kemajuan IPTEK di masyarakat;
7. Tersedianya berbagai fasilitas sosial yang tersedia di masyarakat;
8. Tingkat penghasilan dan pendapatan ekonomi masyarakat; dan
9. Tingkat kesejahteraan masyarakat.

## 2.5 Hubungan Pengembangan Pariwisata dengan Pengentasan Kemiskinan

UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) pada tahun 2010 menyebutkan pariwisata merupakan salah satu pendorong terkuat perdagangan dunia dan kemakmuran. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar di dunia. Meskipun masa sulit bagi perekonomian dunia, fakta-fakta dasar tidak mungkin untuk berubah. Memfokuskan kekayaan menciptakan kekuatan pariwisata pada orang-orang yang paling membutuhkan tetap merupakan kesempatan dan tugas besar. Pariwisata memiliki posisi khusus di dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu :

1. Ukuran dan pertumbuhan sektor ini.

Di banyak negara, pariwisata bertindak sebagai penggerak pembangunan melalui penerimaan devisa dan penciptaan lapangan kerja secara langsung dan tidak langsung. Pariwisata menyumbang 5% dari PDRB dunia. Pariwisata menyumbang 6% dari ekspor dunia dalam bentuk jasa yang menjadi sektor ekspor terbesar keempat setelah bahan bakar, bahan kimia dan produk otomotif. Pariwisata bertanggung jawab atas 235 juta pekerjaan, atau satu dari setiap 12 pekerjaan di seluruh dunia.

2. Relatif pentingnya pariwisata di negara-negara berkembang.

Pariwisata di banyak negara berkembang dan negara kurang berkembang adalah pilihan pembangunan ekonomi yang paling layak dan berkelanjutan, dan di beberapa negara, sebagai sumber utama penerimaan devisa. Hasil dari pendapatan ini bisa dirasakan ke berbagai kelompok masyarakat dan jika, pariwisata dikelola dengan fokus yang kuat pada pengentasan kemiskinan, pariwisata dapat langsung

bermanfaat bagi kelompok miskin dengan cara mempekerjakan masyarakat setempat dalam usaha pariwisata, barang dan jasa yang disediakan untuk wisatawan, atau menjalankan usaha kecil dan berbasis masyarakat, dll, memiliki dampak positif pada pengurangan tingkat kemiskinan. Pariwisata dalam beberapa tahun terakhir telah ditandai oleh dua kecenderungan utama; pertama, konsolidasi tujuan wisata tradisional, seperti di Eropa Barat dan Amerika Utara; dan kedua, yang disebut ekspansi geografis. Munculnya diversifikasi destinasi wisata yang begitu banyak, dan negara-negara berkembang telah merasakan kedatangan wisatawan ke negara mereka meningkat secara signifikan. Pariwisata telah merupakan faktor utama dalam perekonomian negara-negara berkembang.

### 3. Karakteristik pariwisata.

Karakteristik pariwisata sebagai suatu kegiatan yang membuat pariwisata sangat relevan dengan negara-negara berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin di dalam negara tersebut, yaitu:

- a. Pariwisata merespon terhadap aset tertentu. Pariwisata memberikan nilai yang bagus pada beberapa hal umum dari negara-negara berkembang, seperti iklim yang hangat, warisan budaya yang kaya, pemandangan yang menginspirasi, dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Hal tersebut sangat jelas ada di daerah pedesaan, yang mungkin memiliki keunggulan komparatif untuk pariwisata, sementara memiliki kerugian di sebagian besar sektor ekonomi lainnya.
- b. Aksesibilitas kepada masyarakat miskin. Pariwisata merupakan sektor yang relatif padat karya dan secara tradisional terdiri dari usaha kecil dan mikro. Banyak kegiatan di bidang pariwisata sangat cocok untuk wanita, kaum muda, dan kelompok yang kurang beruntung seperti populasi etnis minoritas. Banyak pekerjaan di bidang pariwisata yang berpotensi untuk masyarakat miskin, karena mereka memerlukan relatif sedikit keterampilan dan sedikit investasi. Beberapa mungkin juga pekerjaan paruh waktu dan digunakan untuk menambah penghasilan dari kegiatan lain.
- c. Konektivitas. Sebegitu banyak kegiatan yang berbeda dan masukan untuk membuat produk pariwisata, yang memiliki rantai pasokan yang besar dan beragam, pengeluaran oleh wisatawan bisa menguntungkan berbagai sektor seperti pertanian, kerajinan, transportasi dan jasa lainnya. Perputaran

pengeluaran tambahan oleh orang-orang yang penghasilannya didukung oleh pariwisata menyebarkan manfaat ekonomi lebih lanjut (*multiplier effect*).

- d. Pariwisata menghubungkan konsumen kepada produsen. Pariwisata sangat luar biasa karena merupakan kegiatan yang membawa konsumen ke produsen. Interaksi antara wisatawan dan masyarakat miskin dapat memberikan sejumlah manfaat tak berwujud dan praktis. Hal tersebut berupa peningkatan kesadaran akan masalah budaya, lingkungan, ekonomi, dan nilai-nilai, untuk saling menguntungkan dari peningkatan investasi lokal di bidang infrastruktur.

Di sisi lain, ada juga aspek negatif dari pariwisata sebagai dasar untuk pengentasan kemiskinan, yang memerlukan perhatian khusus, yaitu :

1. Ketidakpastian dan fluktuasi permintaan. Pariwisata sangat sensitif terhadap peristiwa ekonomi, lingkungan, dan sosial-politik yang mempengaruhi kesediaan wisatawan untuk melakukan perjalanan. Dengan tidak adanya perlindungan asuransi dan jaminan sosial, maka masyarakat miskin dapat sangat rentan terhadap penurunan secara mendadak dalam permintaan. Namun, permintaan pariwisata sering kembali meningkat dengan cepat ketika keadaan berubah.
2. Sifat musiman permintaan, yang dapat sangat memuncak. Hal ini membutuhkan integrasi yang baik antara pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya untuk menyediakan sumber daya yang cukup sepanjang tahun.
3. Dampak terhadap sumber daya pendukung kehidupan. Sumber daya tersebut termasuk air, tanah, makanan, sumber energi dan keanekaragaman hayati. Ketersediaan sumber daya tersebut bagi masyarakat miskin bisa terancam oleh kompetisi dan digunakan berlebih pada pariwisata. Penurunan aset dan gangguan pada struktur sosial merupakan ancaman paralel. Isu-isu global tentang menipisnya sumber daya dan penurunan kualitas lingkungan mungkin sama pentingnya dengan yang lokal, termasuk efek jangka panjang pariwisata terhadap perubahan iklim dan dampak dari langkah-langkah adaptasi dan mitigasi terhadap pola perjalanan.
4. Hubungan yang lemah kepada masyarakat miskin. Sifat investasi pariwisata dan kurangnya keterlibatan masyarakat miskin dapat menyebabkan banyak pemasukan dari pariwisata tidak mencapai tujuan kepada masyarakat miskin. Pendapatan yang tersisa mungkin tidak menguntungkan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik.

Mengingat tujuan utama adalah untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan manfaat lainnya yang diperoleh masyarakat miskin dari pariwisata, harus fokus pada dua hal, yaitu :

1. Meningkatkan ukuran dan kinerja sektor pariwisata secara keseluruhan melalui peningkatan, misalnya, jumlah kunjungan, lama tinggal dan biaya yang dihabiskan per wisatawan.
2. Meningkatkan proporsi pengeluaran di sektor yang mencapai masyarakat miskin melalui tindakan tertentu untuk mengaktifkan dan membantu masyarakat miskin berpartisipasi dalam pariwisata atau mendapatkan keuntungan dari pariwisata secara tidak langsung.

Untuk membuat kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, penting untuk bekerja dalam arus utama pariwisata, yang akan memerlukan penekanan pada dua tantangan utama, yaitu :

1. Melibatkan bisnis sektor swasta, termasuk operasi yang cukup besar dan investor pada usaha kecil dan mikro. Di sinilah kekayaan pariwisata dibuat dan didistribusikan. Sektor swasta harus dibantu untuk memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat miskin, melalui praktek-praktek kerja, hubungan local, kegiatan pariwisata *pro-poor* dan produk untuk menjadi lebih kompetitif.
2. Memastikan bahwa destinasi pariwisata secara keseluruhan keduanya kompetitif dan berkelanjutan, isu-isu pengelolaan sumber daya dan hubungan antara pariwisata dan sektor ekonomi lainnya.

UNWTO menyebutkan ada 10 prinsip untuk mengejar pengentasan kemiskinan melalui pariwisata, yaitu :

1. Semua aspek dan jenis pariwisata dapat dan harus peduli tentang pengentasan kemiskinan.
2. Semua pemerintah harus mencakup pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama pengembangan pariwisata dan menganggap pariwisata sebagai alat yang memungkinkan untuk mengurangi kemiskinan.
3. Daya saing dan keberhasilan ekonomi bisnis dan tujuan wisata sangat penting untuk pengentasan kemiskinan, tanpa hal tersebut masyarakat miskin tidak bisa mendapatkan keuntungan.
4. Semua usaha pariwisata harus peduli tentang dampak kegiatan mereka pada masyarakat lokal dan berusaha untuk menguntungkan masyarakat miskin melalui tindakan mereka.

5. Destinasi wisata harus dikelola dengan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama yang dibangun ke dalam strategi dan rencana aksi.
6. Sebuah pemahaman yang baik tentang bagaimana fungsi pariwisata di destinasi diperlukan, termasuk bagaimana pendapatan pariwisata didistribusikan dan siapa yang diuntungkan dari hal tersebut.
7. Perencanaan dan pengembangan pariwisata di destinasi harus melibatkan berbagai kepentingan, termasuk partisipasi dan perwakilan dari masyarakat miskin.
8. Semua potensi dampak pariwisata terhadap kehidupan masyarakat setempat harus dipertimbangkan, termasuk dampak lokal dan global saat ini dan masa depan sumber daya alam dan budaya.
9. Perhatian harus dibayar untuk kelangsungan hidup semua proyek yang melibatkan masyarakat miskin, memastikan akses ke pasar dan memaksimalkan peluang untuk jaringan yang menguntungkan dengan perusahaan yang didirikan.
10. Dampak pariwisata terhadap pengentasan kemiskinan harus dimonitor secara efektif.

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI (2005) menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk beberapa tujuan pokok yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Pariwisata dianggap mampu memberikan perasaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Dampak yang diharapkan, dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan menimbulkan rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

2. Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*).

Pembangunan pariwisata diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapannya adalah bahwa pariwisata harusnya mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

3. Pembangunan Berkesinambungan (*Sustainable Development*).

Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan dan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Artinya penggunaan sumberdaya yang habis pakai cenderung sangat kecil sehingga jika dilihat dari aspek keberlanjutan pembangunan akan mudah untuk dikelola dalam waktu yang relative lama.

4. Pelestarian Budaya (*Culture Preservation*).

Pembangunan kepariwisataan diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara ataudaerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan diberbagai daerah.

5. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia.

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema *paid holidays*.

6. Peningkatan Ekonomi dan Industri.

Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa.

7. Pengembangan Teknologi.

Semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. Kepariwisataan akan

menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut Peraturan Presiden No. 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Program-program penanggulangan kemiskinan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan RPJP Daerah. Program penanggulangan kemiskinan tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok program, yaitu sebagai berikut :

1. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; dan
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Menurut Rais (1995:34) masalah kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi-dimensional, maka strategi penanggulangannya juga harus bersifat multi-dimensional saja. Selama ini yang dilakukan oleh pemerintah hanyalah bersifat ekonomi semata, sehingga apabila kebutuhan ekonomi sudah tercapai seolah-olah proyek penanggulangan kemiskinan itu juga ikut selesai. Hal tersebut menenggelamkan persoalan-persoalan kemiskinan seperti kemiskinan struktural atau politis. Maka dari itu ada beberapa langkah yang perlu diperhitungkan dalam pemberdayaan lapisan masyarakat miskin.

Beberapa langkah pemberdayaan yaitu :

1. Pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Pemberdayaan ini bertujuan menekan perasaan ketidakberdayaan (impotensi) masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial-politis.

2. Pemutusan hubungan-hubungan yang bersifat eksploitatif.

Setelah kesadaran kritis muncul, upaya-upaya memutuskan hubungan-hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan. Pemutusan hubungan itu dapat dilakukan bila terjadi reformasi sosial, budaya, dan politik.

3. Tanamkan rasa kesamaan (*egalitarian*).

Menanamkan rasa kesamaan serta memberikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir, tetapi sebagai penjelmaan konstruksi sosial.

4. Pelibatan masyarakat miskin dalam perumusan pembangunan.

Merealisasikan perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh. Supaya perumusan tersebut tidak mencerminkan kepentingan golongan atau orang-orang tertentu melainkan kepentingan masyarakat miskin.

5. Pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin.

Pentingnya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin. Selain perubahan struktur yang diperlukan juga perubahan nilai-nilai positif kepada lapisan miskin, seperti perencanaan hidup, optimisme, perubahan kebiasaan hidup, peningkatan produktivitas kerja dan kualitasnya dan lain-lain.

6. Redistribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata.

Meskipun keempat langkah di atas dapat dipenuhi tanpa didukung infrastruktur yang memadai, orang miskin tetap saja tidak memperoleh akses ekonomi yang berakibat juga tidak mendapatkan akses ke bidang-bidang lainnya.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 setiap orang berhak:

1. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
2. melakukan usaha pariwisata;
3. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
4. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Sementara setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:

1. menjadi pekerja/buruh;
2. konsinyasi; dan/atau
3. pengelolaan.

Sejalan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tersebut Perda Provinsi Bali yaitu Perda No. 2 Tahun 2012 menyebutkan masyarakat berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan-serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Hak-hak yang dimaksud adalah:

1. sebagai pekerja pada usaha pariwisata;
2. sebagai pengelola Daya Tarik Wisata;
3. melaksanakan promosi; dan
4. duduk dalam kelembagaan pariwisata.

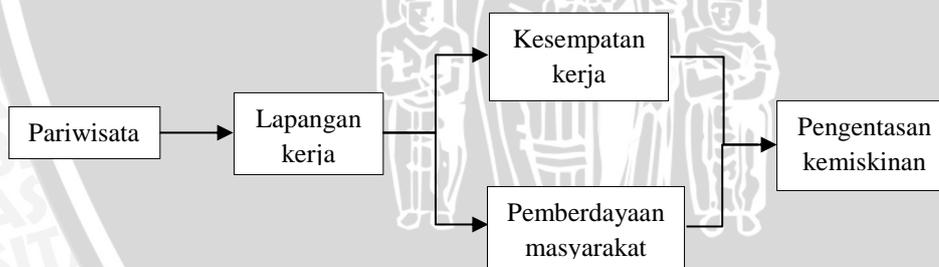
Terdapat beberapa teori maupun peraturan yang menunjukkan antara pariwisata dengan kemiskinan mempunyai hubungan yang cukup erat. Hubungan antara pariwisata dengan kemiskinan dapat dilihat seperti pada **Tabel 2.1**

**Tabel 2.1 Hubungan Pengembangan Pariwisata dengan Pengentasan Kemiskinan**

No.	Sumber	Hubungan
1.	UNWTO 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pariwisata merupakan salah satu pendorong terkuat perdagangan dunia dan kemakmuran.</li> <li>• Pariwisata sebagai penggerak pembangunan melalui penerimaan devisa.</li> <li>• Menciptakan lapangan pekerjaan secara langsung dan tidak langsung.</li> <li>• Pariwisata bertanggung jawab atas 235 juta pekerja (1 dari setiap 12 pekerja di seluruh dunia).</li> <li>• Membangkitkan usaha mikro, kecil, dan menengah.</li> <li>• Pariwisata memberikan dampak ke sektor-sektor lainnya.</li> </ul>
2.	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI (2005)	<p>Tujuan pokok pembangunan pariwisata adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghapusan kemiskinan.</li> <li>• Pembangunan berkesinambungan.</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan.</li> <li>• Peningkatan ekonomi dan industri.</li> </ul>
3.	UU No. 10 tahun 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pariwisata memberikan kesempatan masyarakat sekitar obyek pariwisata untuk menjadi pekerja/buruh, dan pengelola.</li> </ul>
4.	Perda No. 2 tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat mempunyai hak untuk ikut dalam penyelenggaraan kepariwisataan sebagai pekerja pada usaha pariwisata, pengelola Daya Tarik Wisata, untuk melaksanakan promosi, serta untuk duduk dalam kelembagaan pariwisata.</li> </ul>
5.	Rai Utama (2011)	<p>Pariwisata secara nyata berpengaruh positif terhadap perekonomian seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan devisa dan pemicu investasi (<i>foreign exchange earning</i>)</li> <li>• Pendapatan untuk pemerintah (<i>contributions to government revenues</i>)</li> <li>• Penyediaan dan penciptaan lahan pekerjaan (<i>employment generation</i>)</li> <li>• Pembangunan dan perbaikan infrastruktur baik untuk <i>host</i> maupun <i>tourist</i> (<i>infrastructure development</i>)</li> <li>• Pemicu pembangunan perekonomian lokal (<i>development of local economies</i>)</li> </ul>
6.	WTO (1980; 9-12)	<p>Dampak positif pariwisata :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya permintaan akan produk pertanian lokal</li> <li>• Meningkatkan minat dan permintaan wisatawan pada produk lokal.</li> <li>• Meningkatkan jumlah dan permintaan akan produk perikanan dan klautan.</li> <li>• Mendorong pengembangan wilayah dan penciptaan kawasan ekonomi baru.</li> <li>• Penyebaran aktivitas ekonomi.</li> </ul>

No.	Sumber	Hubungan
7.	Yoeti (1996: 23-4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyebaran infrastruktur ke pelosok wilayah.</li> </ul> Keuntungan-keuntungan pariwisata : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tumbuhnya kegiatan beberapa industri yang berhubungan dengan pelayanan pariwisata (perusahaan angkutan, akomodasi perhotelan, restoran, hiburan, toko cenderamata, kesenian daerah, kerajinan, perusahaan perabotan rumah tangga, tata hias dan pertamanan, pendidikan, dll).</li> <li>• Membantu pemerataan pendapatan penduduk.</li> <li>• Menimbulkan efek ganda (<i>multiplier</i>).</li> </ul>
8.	Warpani (2007:79)	Peranan pariwisata bagi daerah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melibatkan masyarakat langsung melalui sektor swasta.</li> <li>• Menciptakan kesempatan kerja di sektor informal (seperti pedagang keliling, pedagang asongan, serta pasar minggu).</li> <li>• Menciptakan lapangan kerja.</li> <li>• Memberdayakan masyarakat melalui industri kecil dan persewaan.</li> </ul>

Dari **Tabel 2.1** terlihat bahwa pariwisata memiliki kontribusi yang kuat terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Menurut UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) pada tahun 2010, pariwisata tidak harus dipandang sebagai jawaban untuk pengurangan kemiskinan, tetapi dapat memberikan kontribusi yang kuat. Potensi untuk mengembangkan lebih banyak pariwisata dan menyalurkan persentase yang lebih tinggi dari pendapatan sektor pariwisata terhadap masyarakat miskin menjadi lebih baik di beberapa sektor dan cukup kecil di sektor lainnya. Namun, mengingat ukuran sektornya, bahkan perubahan kecil dalam pendekatan ketika diterapkan secara luas dapat membuat perbedaan yang signifikan. Dari hal tersebut dapat juga dilihat bahwa pariwisata dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan, seperti pada **Gambar 2.3**

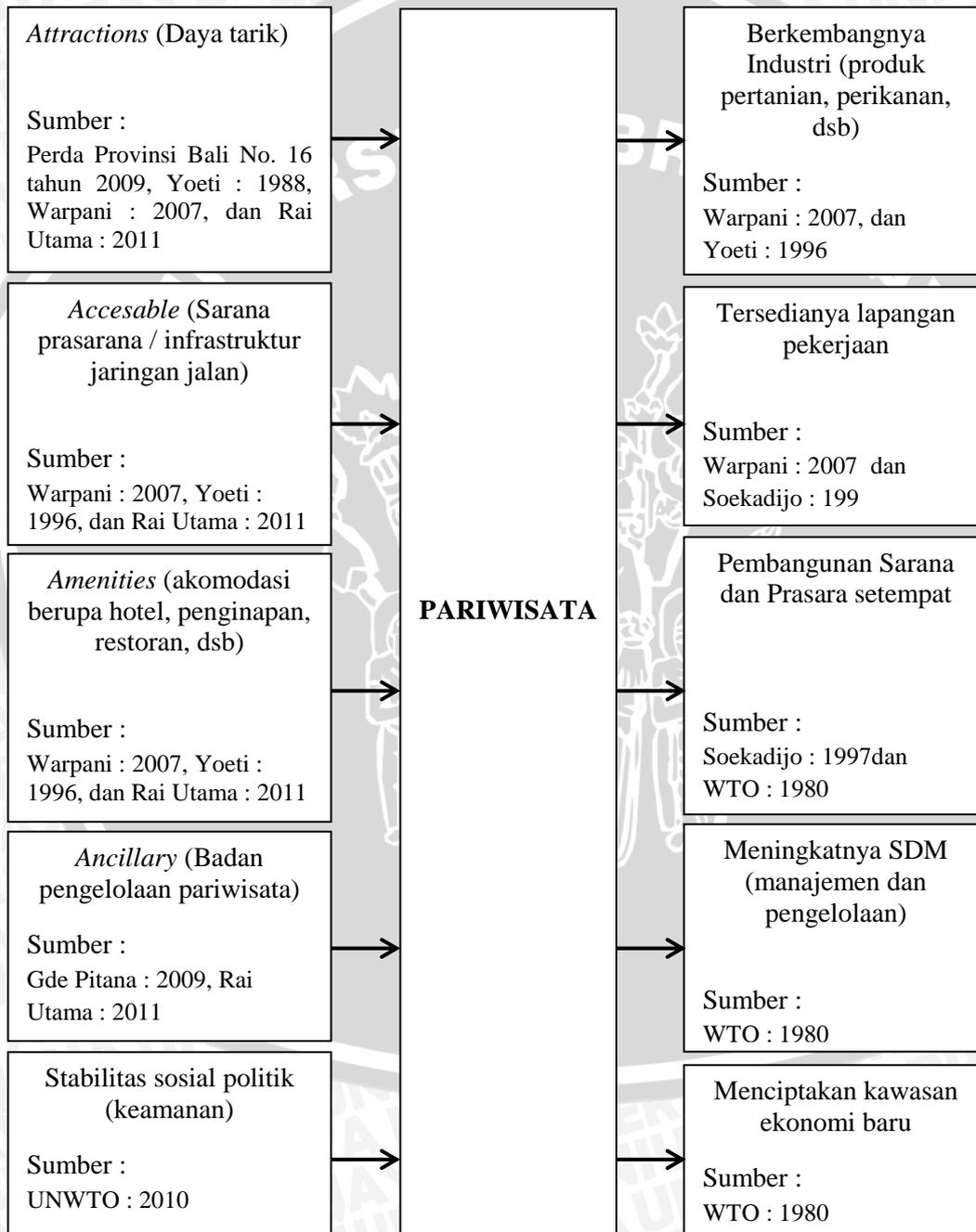


**Gambar 2.3 Hubungan Pengembangan Pariwisata dengan Pengentasan Kemiskinan**

Adanya pariwisata akan mampu untuk membuka lapangan kerja di suatu daerah yang dapat memberikan kesempatan kerja serta pemberdayaan bagi masyarakat setempat. Lapangan kerja disini bisa berupa perusahaan angkutan, akomodasi perhotelan, restoran, hiburan, toko cenderamata, kesenian daerah, kerajinan, perusahaan perabotan rumah tangga, tata hias dan pertamanan, pendidikan, dll, sehingga pariwisata dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan di suatu daerah.

## 2.6 *Backward Forward Pariwisata*

Menurut pendapat para ahli tersebut terlihat jelas bahwa pariwisata akan berkembang apabila ada faktor pembentuk pariwisata (*backward* pariwisata), yang kemudian akan menimbulkan dampak bagi wilayah dan masyarakat sekitar obyek wisata (*forward* pariwisata). Perkembangan pariwisata akan sangat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan jika dilakukan dengan tepat. Banyak sector yang bisa berdampak dari pengembangan pariwisata. Hal tersebut dapat dilihat pada **Gambar 2.4**

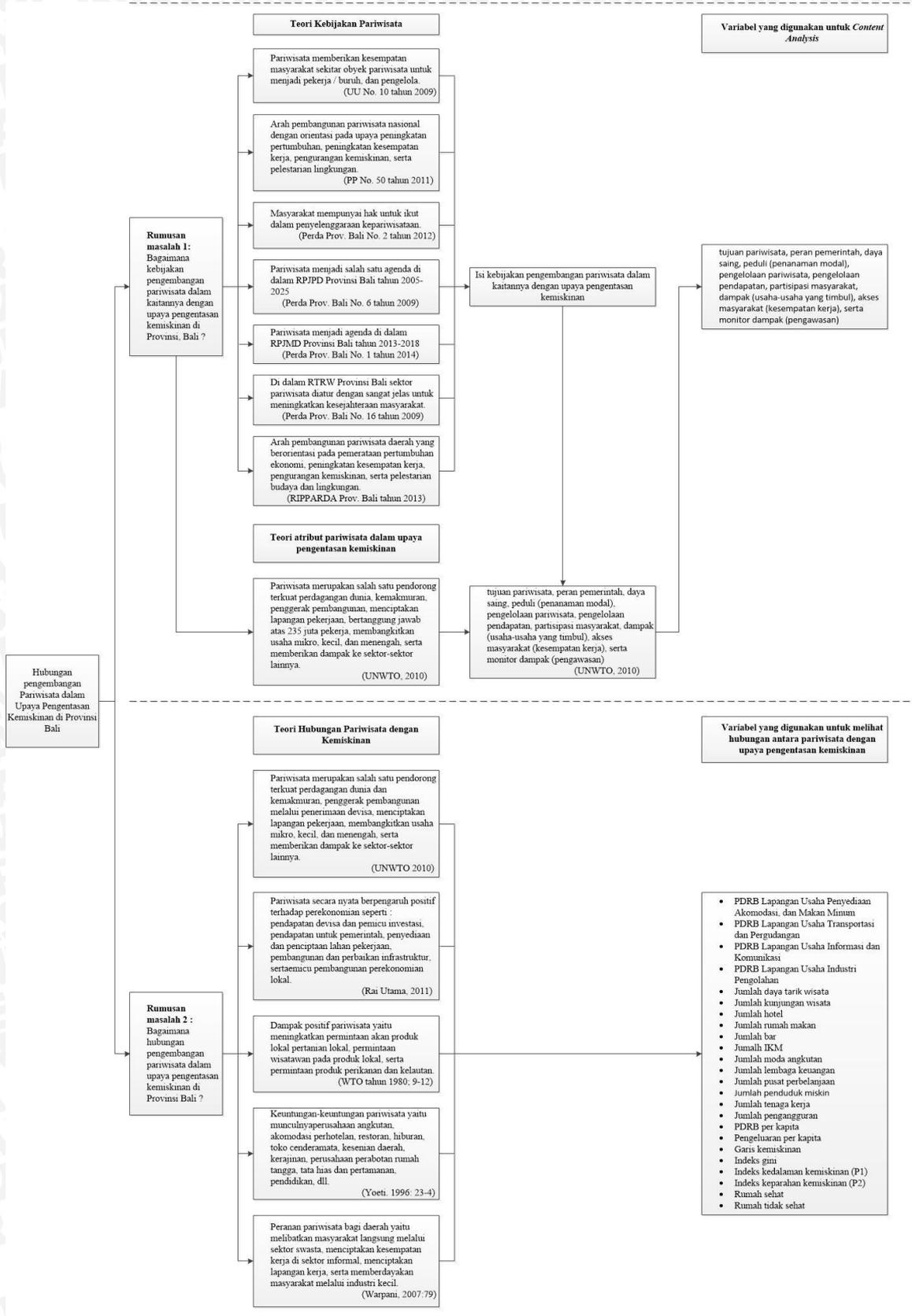


**Gambar 2.4** Hulu dan Hilir Pariwisata

Dari gambar tersebut terlihat bahwa wisatawan akan tertarik datang ke tempat wisata dengan adanya faktor-faktor penarik (*backward* pariwisata). Wisatawan yang berkunjung ke daerah tujuan wisata akan menimbulkan/mengakibatkan berbagai macam pertumbuhan dan perkembangan di wilayah pariwisata tersebut (*forward* pariwisata). Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mensejahterakan masyarakat di wilayah pariwisata tersebut.



## 2.7 Kerangka Teori



Gambar 2.5 Kerangka Teori

## 2.8 Studi Terdahulu

Tabel 2.2 Studi Terdahulu

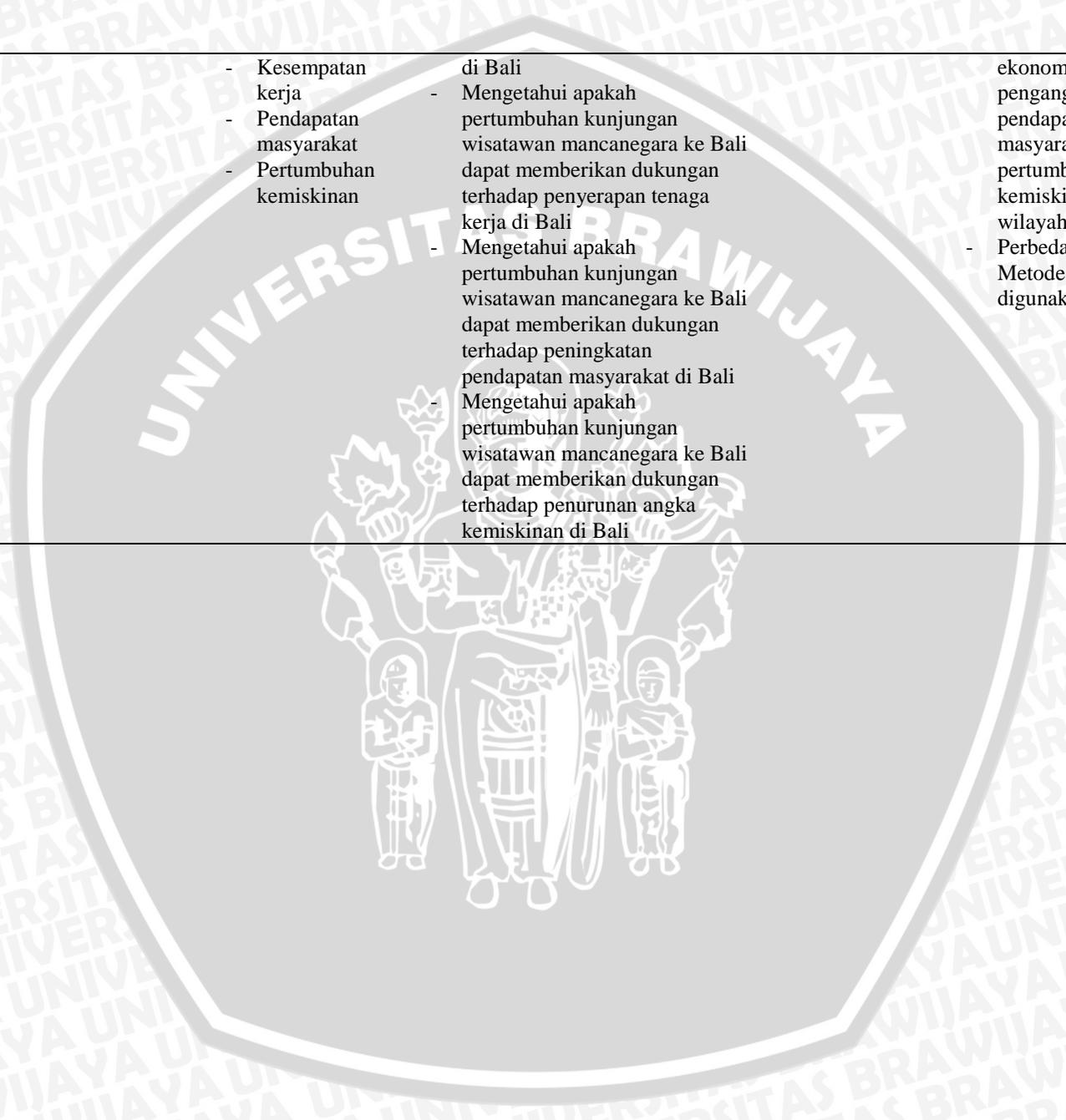
No.	Nama Peneliti	Judul	Publikasi	Variabel	Tujuan	Metode Analisis	Keterangan
1.	Made Anik Wiryantini (2005)	Studi Karakteristik Wisata Alam Danau Buyan Kabupaten Buleleng Berdasarkan Konsep Ekowisata	Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakteristik taman wisata alam danau buyan</li> <li>- Karakteristik wisatawan</li> <li>- Keterlibatan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui kontribusi positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan</li> <li>- Mengkaji faktor-faktor kemiskinan di kabupaten tersebut</li> <li>- Menyusun strategi dan konsep pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis <i>Linkage System</i></li> <li>- Analisis Partisipatif</li> <li>- Analisis Faktor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaan: Mengkaji tentang dampak pariwisata dan wilayah studi yang sama namun beda luasannya.</li> <li>- Perbedaan: Variable dan metode analisis yang digunakan.</li> </ul>
2.	Made Suyana Utama (2006)	Pengaruh Perkembangan Pariwisata Terhadap Kinerja Perekonomian dan Perubahan Struktur Ekonomi serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali	Disertasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkembangan pariwisata</li> <li>- Kinerja perekonomian (PDRB)</li> <li>- Perubahan struktur ekonomi</li> <li>- Kesejahteraan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui pengaruh perkembangan pariwisata terhadap kinerja perekonomian</li> <li>- Mengetahui pengaruh perkembangan pariwisata terhadap perubahan struktur ekonomi di Bali</li> <li>- Mengetahui pengaruh perkembangan pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali</li> <li>- Mengetahui pengaruh kinerja perekonomian terhadap perubahan struktur ekonomi di Provinsi Bali</li> <li>- Mengetahui pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Deskriptif</li> <li>- Analisis Faktor</li> <li>- Analisis Jalur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaan: Mengkaji tentang dampak wisata, variabel penelitian (perkembangan pariwisata, kinerja perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat), serta wilayah studi.</li> <li>- Perbedaan: Metode analisis yang digunakan.</li> </ul>
3.	Christimulia Purnama Trimurti (2013)	Peranan Sektor Pariwisata dalam Perekonomian Provinsi Bali	Jurnal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan ekonomi (PDRB)</li> <li>- Pertumbuhan pengangguran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui apakah pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Kualitatif Deskriptif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaan: Mengkaji tentang dampak wisata, variabel penelitian (pertumbuhan</li> </ul>

- Kesempatan kerja
- Pendapatan masyarakat
- Pertumbuhan kemiskinan

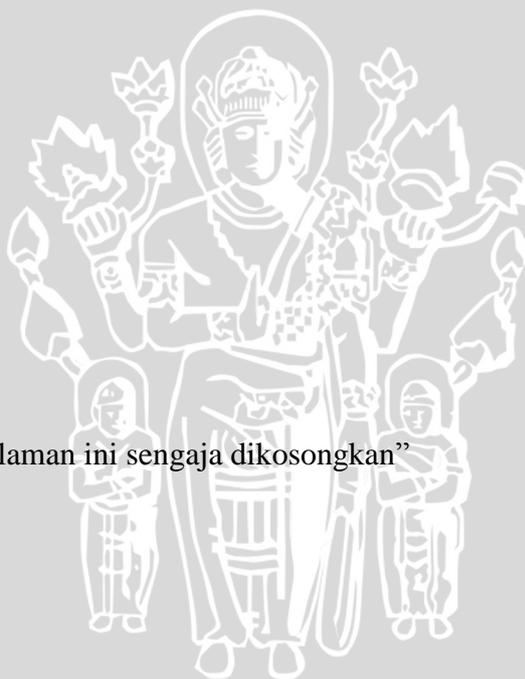
- di Bali
- Mengetahui apakah pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dapat memberikan dukungan terhadap penyerapan tenaga kerja di Bali
- Mengetahui apakah pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dapat memberikan dukungan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Bali
- Mengetahui apakah pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dapat memberikan dukungan terhadap penurunan angka kemiskinan di Bali

ekonomi, pertumbuhan pengangguran, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan kemiskinan), serta wilayah studi.

- Perbedaan: Metode analisis yang digunakan.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



“Halaman ini sengaja dikosongkan”